

SAMBUTAN
KETUA BADAN PERFILMAN INDONESIA
PADA ACARA PEMBUKAAN
KONFERENSI PERFILMAN NASIONAL
TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perayaan ke-73 Hari Film Nasional di tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk berbincang tentang film, tentang Wajah Perfilman Nasional. Hari Film Nasional tahun 2023 ini tak hanya sebagai wujud perayaan bahwa pada tanggal 30 Maret 1950 yang lalu merupakan momen sejarah karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia. Namun hendaknya, perayaan Hari Film Nasional 2023 dijadikan sebagai momen yang baik untuk berpikir kritis tentang Perfilman Nasional. Memandang upaya penguatan dan pemajuan Perfilman di Indonesia dalam bingkai ekosistem Perfilman Nasional, melalui upaya “Bercermin pada masa lalu, Merencanakan masa depan”. Perayaan Hari Film Nasional 2023 merupakan wujud dari amanat Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1999 tentang Hari Film Nasional, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi

para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan internasional.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan Perfilman Nasional terbilang cukup menggembirakan. Tren positif ini terlihat dari peningkatan jumlah produksi film dan jumlah penonton. Capaian prestasi gemilang dengan raihan 61% *market share* penonton film di Indonesia pada akhir tahun 2022 merupakan momentum penting yang mengokohkan Perfilman sebagai industri dan pranata sosial yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Menjadi lebih kuat dan lebih maju, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan.

Meskipun jumlah dan sebaran bioskop masih jauh untuk dikatakan dalam kondisi ideal, namun jumlah layar yang dikelola oleh ekshibitor terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Seiring tren penggunaan data sebagai alat bantu dalam media *online* berkembang pesat, layanan *streaming* baik VOD maupun OTT turut meningkat pesat. Semakin hari, *platform* media baru semakin menjanjikan sebagai kanal alternatif bagi penonton dan sebagai lapangan kerja bagi pelaku usaha Perfilman Nasional. Namun begitu,

tren positif ini juga menyimpan tantangan besar, kanal digital masih sangat rentan pembajakan. Hal ini merupakan ancaman serius bagi industri film nasional.

Pada ekosistem Perfilman, bioskop dan *digital streaming* merupakan bentuk dari aspek ekshibisi. Dalam perspektif pengembangan perfilman, aspek-aspek ekosistem perfilman yang meliputi Pendidikan, Apresiasi, Produksi, Distribusi, Ekshibisi, Kepenontonan, dan Pengarsipan film selayaknya dipandang sebagai sebuah siklus. Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Setiap aspek dalam ekosistem akan saling mempengaruhi. Jika terdapat salah satu aspek dalam ekosistem terganggu dan rapuh, akan menyebabkan aspek lainnya akan terganggu pula.

Tiap tahun peningkatan produksi dan minat bekerja di Perfilman semakin meningkat. Ada banyak talenta baru hasil dari pendidikan dan pelatihan Perfilman 'mengantri' untuk masuk dan bekerja di industri film Indonesia. Pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan film, baik formal maupun informal di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan indikasi peningkatan potensi tenaga kerja di bidang Perfilman. Di sisi lain, saat ini produksi film masih memiliki masalah minim pekerja, hasil pendidikan dan

pelatihan Perfilman tidak langsung dapat terserap di pasar kerja. Selain efek tenaga kerja yang menjadi pengangguran, ada juga efek orang yang baru lulus dari pendidikan formal yang tidak dapat secara langsung atau cepat mendapat pekerjaan. Kondisi ini akan berakibat pada saat kondisi pertumbuhan Perfilman yang semakin meningkat akan mengalami kendala kekurangan pekerja film.

Secara umum gap antara permintaan dan penawaran terjadi karena adanya perbedaan skill yang dimiliki tenaga kerja yang tersedia di pasar dengan tenaga kerja yang dibutuhkan di industri, serta masih terdapat informasi asimetris antara permintaan dan penawaran di pasar kerja film. Salah satu kondisi yang menunjukkan adanya gap ini adalah perekrutan tenaga kerja di industri film umumnya bersifat tertutup, dan hanya merekrut tenaga kerja yang sudah dikenal. Salah alasan mendasar terkait pola perekrutan yang cenderung tertutup ini karena industri film Indonesia belum memiliki konvensi tentang standardisasi, baik *standard operating procedure* (SOP), standar alur kerja, standar etika kerja, dan standar mutu dalam ekosistem kerja produksi, distribusi hingga ekshibisi. Film sebagai komoditas masih menjadi produk yang 'sangat plastis' dan sulit untuk diukur, baik dalam tahapan perencanaan dan proyeksi

hingga capaian akhir dalam bentuk ekshibisi. Alih-alih akan 'menitipkan' nilai-nilai dan karakter bangsa dalam konten, film sebagai produk ekonomi kreatif masih jauh dari pandangan sebagai komoditas bisnis yang menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi.

Undang-Undang Perfilman mengamanatkan film harus dapat berfungsi memajukan kesejahteraan masyarakat. Ekspansi dan diversifikasi pasar bagi perdagangan produk maupun jasa film merupakan hal yang harus segera dipikirkan dengan serius. Pasar luar negeri merupakan bagian dari penggalian pasar yang belum dimaksimalkan selama ini. Dalam bagian lain, Undang-Undang ini menekankan bahwa usaha pemajuan ekonomi perfilman ini mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam melaksanakan hubungan industrial Perfilman Nasional, masing-masing unsur pelaku Perfilman memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Hubungan industrial memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan Perfilman Nasional. Hubungan Industrial yang harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, akan menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha yang sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja film.

Secara akumulatif, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya fungsi hubungan Industrial Perfilman Nasional dikelola secara kredibel dan akuntabel.

Jika selama ini arah promosi pembuatan film di Indonesia cenderung memproyeksikan kedatangan wisatawan yang datang ke daerah tempat syuting setelah menonton film yang dihasilkan, maka perlu semakin dibangun kesadaran bahwa produksi film itu sendiri berpotensi membawa masuk devisa dalam jumlah besar yang menetes langsung kepada masyarakat di daerah itu. Pelaku film dan pemerintah sebuah daerah harus menjemput bola untuk mendapatkan kesepakatan pembuatan film oleh orang asing atau oleh orang dari luar daerah itu. Film yang datang dari luar membawa devisa kepada daerah itu dalam berbagai bentuk, dan memaksimalkan pembuatan film dari luar daerah penting dilakukan untuk memastikan sumber daya yang dikeluarkan pada saat persiapan, saat syuting dan setelah syuting sebanyak mungkin menetes ke masyarakat di daerah itu.

Dunia Perfilman harus diproyeksikan sebagai upaya untuk mencapai kecerdasan kehidupan bangsa, hal ini selaras dengan Pembukaan UUD 1945 karena film memiliki banyak dimensi dalam ekosistemnya. Selain memiliki fungsi ekonomi, film memiliki fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Semangat bertumbuh yang selalu dipertontonkan oleh komunitas film diseluruh wilayah Indonesia dengan segala bentuk aktivitasnya menjadi dasar kebutuhan yang harus dipikirkan bersama oleh para pemangku kepentingan untuk mewujudkan terciptanya sinergitas kerja dalam hal aksi nyata pengembangan SDM perfilman dan penguatan komunitas film, mengingat kembali dalam pasal 49 UU Perfilman disebutkan insan perfilman berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan perfilman dan usaha perfilman, serta mendapatkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah dan pemerintah daerah. Festival film yang banyak bermunculan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat apresiasi terhadap karya film semakin baik, namun hal ini juga perlu disikapi dengan kritis oleh para pengelola festival serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga penting kiranya ada pembahasan yang lebih spesifik tentang tata kelola festival film

untuk lebih memberikan input bagi penyelenggaraan festival dengan tujuan festival film yang ada di Indonesia dapat menunjukkan karakteristik atau ciri khas yang berbeda antara festival satu dengan festival yang lain, selain itu juga berkaitan dengan sumber daya dan model jejaring penggerakannya, dengan begitu arah pengembangan ekosistem perfilman Indonesia akan semakin memberikan warna positif.

Dunia digital mendominasi dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hubungan kedua konteks ini membawa implikasi yang mendasar dalam ekosistem pengarsipan dan akses data film, baik berhubungan dengan infrastruktur maupun non infrastruktur terkait SDM dan kebijakan. Mengurai masalah dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, pelaku usaha pengarsipan, dan komunitas seperti yang tertulis pada pasal 38 UU Perfilman untuk merespon isu-isu kritis soal pengarsipan dan akses data film yang terus berkembang merupakan upaya yang harus selalu dirawat. Mengingat kembali bahwa kerja pengarsipan menjadi bagian penting yang wajib dilakukan di semua bagian ekosistem perfilman nasional dengan ragam model kegiatannya.

Baik sebagai karya dan atau media, film tidak bersifat bebas nilai, karena film juga merupakan pranata sosial dengan kepribadian dan karakter bangsa. Dengan begitu, semua bentuk penyelenggaraan Perfilman, baik yang bersifat non-komersil dan komersil selayaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Jika kode etik profesi merupakan perangkat sistem norma, nilai, atau aturan untuk menegaskan baik atau buruknya suatu perbuatan para profesional di sebuah bidang. Penyelenggaraan produksi film yang intens tapi tetap melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesetaraan hak para pekerjanya, pertanggungjawaban pada kualitas dan kekuatan film yang dihasilkan, distribusi film yang merata, pengarsipan film yang tidak tebang pilih, sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab insan film dan pemangku kepentingan Perfilman.

Inisiatif-inisiatif pengembangan Perfilman Nasional harus terus terjadi. Berbagai inisiatif-inisiatif di masa mendatang masih harus terus dikoordinasikan dan disinergikan, sehingga setiap tindakan yang dilaksanakan dapat dipastikan akan mencapai tujuan yang sama. Upaya penguatan dan pemajuan Perfilman Nasional dapat dilihat dalam lingkup yang lebih luas meliputi keseluruhan

ekosistem infrastruktur, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar aspek-aspek dalam Perfilman dapat berlangsung, suprastruktur yang berhubungan dengan aspek produksi, distribusi, ekshibisi, pendidikan, kepenontonan, dan pengarsipan film. Sehingga pada akhirnya akan terwujud perfilman Indonesia yang berdaya saing, tumbuh dan beragam. Menuju Perfilman Nasional yang berdaya saing diperlukan kerangka pikir Perfilman yang sistemik dan fokus yang mendalam dari seluruh pemangku kepentingan Perfilman. Karena berdaya saing tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai kemampuan berkompetisi secara nasional dan global, berdaya saing adalah kesatuan dan keterpaduan antara lembaga, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas Perfilman Nasional. Oleh karenanya, diperlukan konsep pengaturan Perfilman yang lebih baik, agar kreativitas Perfilman Nasional tetap tumbuh dan waspada terhadap dampak negatif Perfilman tetap terjaga.

Kami sangat optimis bahwa enam hari ke depan kita bisa bersama-sama dapat melihat wajah kita, wajah Perfilman kita yang kemudian dapat kita jadikan sebagai bahan untuk berbenah, memajukan Perfilman Indonesia. Karena kami yakin bahwa telah banyak kajian-kajian, baik yang dilakukan pemerintah, maupun

peneliti-peneliti Perfilman yang tergabung dalam berbagai asosiasi siap untuk dibentangkan dan diperbincangkan di forum ini.

Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam konferensi ini baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Semoga segala bentuk upaya yang tercurah dalam konferensi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Perfilman Indonesia.

Salam Sinema, Salam Budaya dan Salam Kreatif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 6 Maret 2023

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia

Gunawan Paggaru, S.Ikom., CFP., CFD., CFE.